

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Serang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang.

Peraturan Daerah tersebut menggantikan Perda Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Serang, dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serang merupakan pemisah dari bidang Anggaran Perbendaharaan, bidang Akuntansi dan bidang Aset Daerah ke Sekretaris Daerah Kabupaten Serang. Berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) tersebut maka terbentuklah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang.

2. Visi dan Misi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang

Visi BPPD

“Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pembangunan Kabupaten Serang”.

Misi BPPD

- a. Mewujudkan masyarakat yang taat membayar Pajak.
- b. Mengembangkan Sistem Administrasi Perpajakan Daerah yang terukur.
- c. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
- d. Mendorong peningkatan mutu pelayanan publik melalui peningkatan sarana dan prasarana dan kualitas sumber daya manusia (SDM) .

3. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang

Dinas Pendapatan Daerah adalah Unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang di bidang Pendapatan Daerah. Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Daerah yakni Bupati. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang, di pimpin seorang Kepala Dinas, Seorang Sekretaris, 4 Kepala Bidang dan 3 Kepala Sub Bagian, 12 Kepala seksi, 1 Kepala UPT Pelayanan dan 8 Kepala UPTPD Kecamatan dengan SOTK terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Bidang Penagihan dan Pembukuan
- d. Bidang Pajak Daerah Lainnya
- e. Bidang PBB dan BPHTB
- f. Bidang Penggalian Potensi dan Pengendalian
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. UPT Pajak Daerah UPT Pelayanan
- i. UPT Pajak Daerah.

4. Jenis – jenis pajak yang ada di Kabupaten Serang

Jenis-jenis pajak kabupaten :

- a. Pajak hotel.
- b. Pajak restoran.
- c. Pajak hiburan.

- d. Pajak reklame.
- e. Pajak penerangan jalan.
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
- g. Pajak parkir.
- h. Pajak air tanah.
- i. Pajak sarang burung walet. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan
- j. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

B. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa Pajak Reklamedan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang Perbulan dari tahun 2014-2016.

1. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggara reklame, yaitu benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh khalayak umum untuk kepentingan komersial.

Adapun Pajak Reklame Kabupaten Serang tahun 2014-2016 disajikan sebagai berikut ini:

Tabel 4.1
Realisasi Penerimaan Pajak Reklame 2014-2016

NO	BULAN	PR Tahun 2014	PR Tahun 2015	PR Tahun 2016
1	Januari	81.147.100	128.957.855	397.553.273
2	Februari	166.454.660	163.383.559	56.109.330
3	Maret	128.135.337	87.235.094	114.157.932
4	April	137.226.880	197.824.205	74.655.484
5	Mei	119.799.015	42.583.137	80.339.800
6	Juni	89.966.174	150.325.648	221.450.051
7	Juli	77.651.678	83.739.787	30.252.563
8	Agustus	83.641.533	38.735.014	74.637.578
9	September	108.224.782.	99.359.712	208.165.602
10	Oktober	79.163.094	146.753.467	232.581.600
11	November	147.755.611	176.890.249	68.590.724
12	Desember	71.797.884	267.368.205	79.564.465
	Jumlah	1.290.963.748	1.583.155.392	1.638.058.402

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang 2014-2016

Tabel 4.2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten 2014-2016

NO	BULAN	PAD Tahun 2014	PAD Tahun 2015	PAD Tahun 2016
1	Januari	12.942.890.093	39.603.320.423	20.658.644.446
2	Februari	12.120.977.458	36.543.455.385	8.867.039.590
3	Maret	10.958.516.089	49.388.183.479	32.604.459.857
4	April	12.806.804.628	61.104.358.143	28.544.353.339
5	Mei	11.783.337.015	36.886.116.742	25.124.075.947
6	Juni	27.012.269.918	41.968.165.740	29.390.870.358
7	Juli	25.311.065.209	41.968.165.740	17.740.234.161
8	Agustus	28.133.427.094	45.556.060.392	39.302.482.149
9	September	21.958.667.155	81.772.166.560	21.141.412.665
10	Oktober	33.393.099.296	33.495.064.330	17.325.835.766
11	November	18.188.843.914	59.621.875.856	22.990.759.916
12	Desember	29.688.979.839	50.977.284.004	24.946.183.556
	Jumlah	244.298.877.708	579.605.446.965	288.636.351.640

Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang 2014-

2016

2. Hasil Pengolahan Data

Dari pengolahan data menghasilkan uraian tentang efektifitas pajak reklame terhadap PAD yang berada di Kab. Serang selama 2014-2016 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.3
Pajak Reklame 2014-2016
(Persen)

tahun	pajak reklame (target)	pajak reklame (realisasi)	(%)
2014	1.107.937.500	1.290.963.748	85,82%
2015	1.468.500.000	1.583.155.932	92,76%
2016	1.505.600.000	1.638.058.402	91,91%

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang

Pada tingkat penerimaan pajak reklame yang berada di Kab. Serang yang dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak reklame dengan target pajak reklame yang berada di Kab. Serang. Dengan rumusan sebagai berikut :

$$efektivitas = \frac{\text{realisasi penerimaan pajak reklame}}{\text{target pajak reklame}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan efektivitas pajak reklame menghasilkan angka atau persentase melebihi 100%, maka pajak reklame semakin

efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak reklame semakin baik. Dalam penelitian ini yang di pertimbangan dalam menentukan efektifitas adalah pencapaian target¹

Dari hasil perhitungan diatas, maka dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan pajak reklame Kab. Serang kurang efektif. Hal ini dikarenakan nilai efektivitas kurang dari 100% dikisaran 80%-90% pertahun. Terlihat pada tahun 2015 efektifitas pajak reklame tertinggi sebesar 92,76% di Kab. Serang selama kurun waktu 2014-2016. Sedangkan pada tahun sebelumnya yakni 2016 pajak reklame di Kab. Serang turun sebesar 91,91%.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear berganda atau *Ordinary Least Square* (OLS) terdapat masalah-masalah asumsi klasik (Uji Normalitas, Heteroskedastisitas, dan Autokorelasi).

¹ Mawar Dwi Putranty, “*Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (2002-2007)*,” (S.E. skripsi, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2008), 70

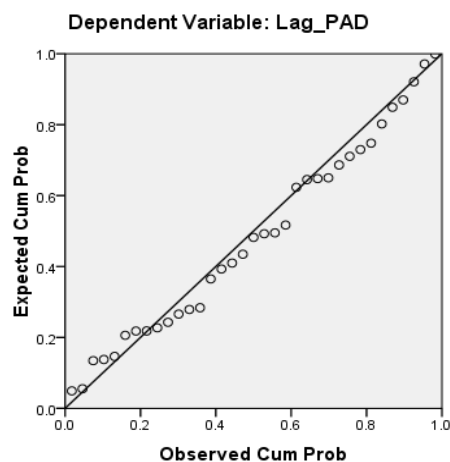
a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.² Adapun model regresi yang baik ialah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Berdasarkan pengujian uji normalitas dengan menggunakan SPSS 16.0, maka diperoleh hasil *output* sebagai berikut :

Gambar 4.1

Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



²Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016) 154

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat dari grafik Normal P-P Plot tersebut dapat dilihat bahwa sebaran data dalam penelitian ini memiliki penyebaran dan distribusi mendekati normal, hal itu dikarenakan data yang sesungguhnya memusat mendekati garis diagonal Normal P-P Plot. Jadi dapat disimpulkan data pada penelitian ini memiliki penyebaran dan pendistribusian mendekati normal. Untuk membuktikan uji normalitas maka digunakan *Kolmogorov-Smirnov* pada SPSS 16. Maka diperoleh hasil *output* sebagai berikut :

Tabel 4.4

One Sampel Kolmogorov-Smirnov Test

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^a	Mean	-.0000005
	Std. Deviation	1.60466607E10
Most Extreme Differences	Absolute	.106
	Positive	.106
	Negative	-.089
Kolmogorov-Smirnov Z		.633
Asymp. Sig. (2-tailed)		.817

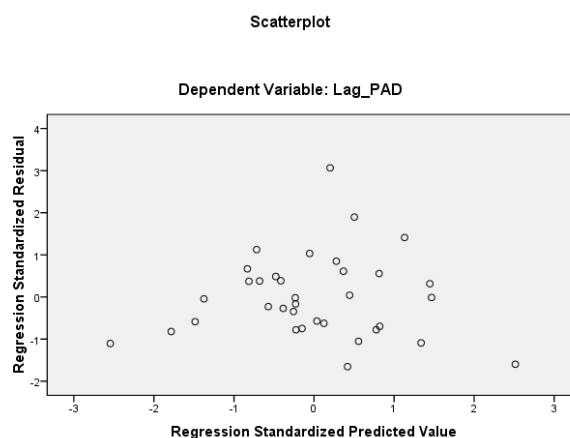
a. Test distribution is Normal.

Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov Smirnov Test* diatas, maka memperoleh hasil nilai *Asymp. Sig* bernilai (0,817) yang berarti memiliki nilai lebih besar dari (0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terdistribusi mendekati normal dan model yang dipakai untuk memprediksi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kab.Serang.

b. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi terhadap gejala heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan scatter plot pada SPSS 16. Yang seperti terlihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.2
Uji Heteroskedastisitas



Dari gambar *scatter plot* diatas dapat terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta penyebaran titik-titik melebar diatas dan dibawah sumbu Y pada angka 0, maka mengindikasikan bahwa kontribusi pajak reklame terhadap PAD di Kabupaten Serang selama 2014-2016 tidak terdapat heteroskedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model ada korelasi antar kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada Durbin Watson sebagai berikut:

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.053 ^a	.003	-.027	1.40496E10	2.302

a. Predictors: (Constant), Lag_PajakReklame

b. Dependent Variable: Lag_PAD

Berdasarkan tabel di atas, nilai DW_{hitung} sebesar 2.302. Dengan diperoleh DW_{tabel} untuk “ $k=1$ ” dan “ $N=36$ ” adalah nilai dari d_l (batas bawah) sebesar 1.4107 dan nilai (batas atas) sebesar 1.5245 d_u . Jadi berdasarkan pedoman uji statistik Durbin Watson dapat dilihat bahwa nilai DW_{hitung} terletak diantara ($d_u < dw < 4-d_u$), yakni sebesar $1.5245 < 2.302 < 2.4755$. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak ada autokorelasi karena berada dalam daerah tidak ada autokorelasi.

2. Koefisien Korelasi

Koefisien korelasi bertujuan untuk menunjukkan kemampuan hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Angka dalam koefisien korelasi dihasilkan dalam uji ini berguna untuk menunjukkan kuat lemahnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut ini hasil uji analisis koefisien korelasi yang telah diolah menggunakan SPSS 16.0 yang akan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Korelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.053 ^a	.003	-.027	1.40496E10	2.302

a. Predictors: (Constant), Lag_PajakReklame

b. Dependent Variable: Lag_PAD

Dari hasil penelitian terlihat koefisien korelasi (R) sebesar 0,53 yang berarti tingkat hubungan antara variabel pajak reklame dengan variabel PAD Kabupaten Serang adalah sangat rendah dikarenakan berada dalam interval koefisien (0,000 - 0,199).

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. apabila dalam proses mendapatkan R^2 yang tinggi adalah baik, namun apabila dalam proses mendapatkan R^2 yang rendah tidak berarti model regresi

buruk. Adapun nilai R^2 dalam penelitian ini terlihat pada tabel adalah sebagai berikut :

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.053 ^a	.003	-.027	1.40496E10	2.302

a. Predictors: (Constant), Lag_PajakReklame

b. Dependent Variable: Lag_PAD

Nilai dari koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,003. Hal ini berarti variabel X(pajak reklame) dapat menjelaskan variabel Y (PAD) di Kab. Serang sebesar 0.03%. Sedangkan sisanya yakni sebesar $100\% - 0.3\% = 99.7\%$ dijelaskan oleh fakto-faktor lainnya.

4. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi Sederhana digunakan untuk memprediksi seberapa jauh perubahan nilai variabel dependen, bila nilai variabel independen dimanipulasi/dirubah-rubah atau dinaik-turunkan.³

³Sugiono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2012), 260

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pajak reklame terhadap PAD Kabupaten Serang selama Januari 2014 sampai dengan Desember 2016. Hasil dari persamaan regresi ini diperoleh dari SPSS 16.0 dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8
Analisis Regresi Linear Sederhana

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15504994518.647	3059217441.330		5.068	.000
Lag_PajakReklame	9.235	30.056	.053	.307	.761

a. Dependent Variable: Lag_PAD

Dari tabel tersebut dapat diperoleh hasil regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 15504994518.647 + 9.235 X$$

Jadi berdasarkan fungsi persamaan regresi linear berganda tersebut, maka dapat diketahui sebagai berikut :

- a. Kostanta (nilai mutlak Y) apabila pajak reklamesama dengan nol, maka PAD di Kabupaten Serang sebesar 15504994518.647.

- b. Koefisien regresi X (pajak reklame) sebesar 9.235 artinya apabila pajak reklame naik sebesar satu satuan rupiah, maka akan menyebabkan kenaikan PAD di Kabupaten Serang atau berpengaruh positif sebesar 9.235; bila variabel lain konstan

5. Uji Hipotesis (Uji t)

Uji statistik t digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan.

Ini adalah *output* uji t yang telah diolah menggunakan SPSS 16.0 yang disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.9

Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	15504994518.647	3059217441.330		5.068	.000
Lag_PajakReklame	9.235	30.056	.053	.307	.761

a. Dependent Variable: Lag_PAD

Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} maka H_0 ditolak, dan jika t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} maka H_0 diterima. Hasil yang

didapat pada tabel 4.8 di atas, nilai t_{hitung} variable pajak reklame lebih kecil dari t_{tabel} ($0.307 < 2.03011$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Sedangkan jika dilihat pada tingkat signifikansi apabila tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima, sedangkan jika tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak. Dari perhitungan di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi variabel pajak lebih besar dari 0,05 ($0,761 > 0,05$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel pajak reklame tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Serang.

6. Pembahasan Penelitian

a. Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame

Dari hasil penelitian tentang efektivitas penerimaan pajak reklame di Kabupaten Serang selama 2014 – 2016 kurang efektif, yakni sekitar 80%-90%. Terlihat pada tahun 2015 efektivitas pajak reklame tertinggi sebesar 92,76% di Kabupaten Serang selama kurun waktu 2014-2016. Sedangkan pada tahun sebelumnya yakni 2016 pajak reklame di Kabupaten Serang turun sebesar 91,91%.

Dengan melihat rata-rata pajak reklame di Kab. Serang selama 2014-2016 yang kurang dari 100% setiap tahunnya yang membuat pajak reklame kurang efektif. Hal ini karena jumlah reklame yang berada di Kabupaten Serang kurang dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang berada di Provinsi Banten. Sehingga penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Serang dari pajak reklame kurang dapat diandalkan sebagai pendapatan asli daerah (PAD).

b. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada di Kabupaten Serang

Dari hasil penelitian pada hipotesis uji t diatas, maka dapat disimpulkan nilai t_{hitung} variable pajak reklame lebih kecil dari t_{tabel} ($0.307 < 2.03011$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan nilai signifikansi variabel pajak reklame lebih besar dari 0,05 ($0,761 > 0,05$) maka H_0 diterimadan H_a ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel pajak reklame tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD di Kabupaten Serang.

c. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada di Kabupaten Serang menurut Perspektif Islam.

Dari hasil penelitian pada Uji Koefisien Korelasi (R) terlihat bahwa hubungan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Serang selama 2014-2016 memiliki hubungan sangat rendah, yakni sebesar 0,53. Dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,003 atau 0,3% sedangkan sisanya, yakni ($100\% - 0,03\% = 99,97\%$) dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian.

Rendahnya kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada di Kab. Serang selama 2014-2016 disebabkan karena beberapa faktor yakni kurangnya tempat pemasangan reklame yang berada di Kabupaten Serang, serta rendahnya tarif pemasangan reklame membuat rendahnya pemungutan pajak reklame itu sendiri, sehingga pajak reklame tidak memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Serang. Adapun faktor lain yang dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Serang antara lain : Pajak Bumi

dan Bangunan, Pendapatan Pariwisata, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Sedangkan menurut perspektif islam terkait pemungutan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah(PAD) adalah pemanfaatan reklame yang dapat memberikan manfaat bagi pembiayaan pengeluaran daerah serta pembanguan daerah yang berada di Kabupaten Serang. Dengan negara mengambil manfaat dari reklame untuk digunakan pada anggaran pendapatan asli daerah dengan tujuan untuk pengeluaran dan pembanguan daerah yang berada di wilayah Kabupaten Serang.

Jadi pendapat diatas dapat disimpulkan, bahwa pemanfaatan atas suatu harta yang wajib adalah zakat, namun jika terdapat kondisi dimana adanya kehendek atau keperluan tambahan, maka akan ada kewajiban lain berupa pajak (*dharibah*). Yang berarti diperbolehkan bagi pemerintah untuk memungut pajak dengan alasan untuk kemasalahtan umat dengan syarat adil, merata dan tidak membebani masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa ayat 58 yaitu :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S An-Nisa : 58)⁴

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa hukum syari’at yang berhubungan dengan amanat wajib bagi manusia. Berarti jika seseorang menjadi pemimpin suatu pemerintahan, maka pemerintah wajib menetapkan serta memungut pajak dengan adil kepada masyarakat, agar pajak tidak dianggap sebagai alat untuk membebankan kepada rakyat.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahannya*